



Transformasi Sosial di Era Digital dalam Perubahan Media Komunikasi Publik

Citra Ningsih Mardalena Lase¹, Michael Andrian Sirait², Nova Simbolon³, Theofilus Mandowally⁴

^{1 2 3 4}Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email lasecitra2508@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 13, 2025

Revised April 19, 2025

Accepted April 26, 2025

Keywords:

Public Communication, Digital Era, Media Digitalization, Information Security, Artificial Intelligence, Hoax, Public Participation.

ABSTRACT

The digital era has brought significant changes in public communication, especially through the transformation of media and information technology. This article discusses the impact of digitalization on public communication, with a focus on transparency, accountability, public participation, and emerging challenges, such as hoaxes and disinformation. The development of social media and digital platforms has shifted communication patterns from one-way to two-way and more interactive, allowing the public to play an active role in the policy and governance process. The digitalization of public communication media encourages governments and institutions to be more open and responsive to the needs of the community. However, this change also presents challenges, especially related to information security and ethics in communicating in the digital space. Data security, privacy protection, and the spread of fake news are major concerns in maintaining the credibility of public communication. In addition, advances in artificial intelligence (AI) are increasingly influencing public communication, both in information automation, content personalization, and fake news detection. AI offers efficiency in the dissemination of information, but also poses ethical challenges that need to be anticipated. With the increasing integration of AI in public communication, clear policies are needed to ensure transparency and accuracy of information conveyed to the public.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 13, 2025

Revised April 19, 2025

Accepted April 26, 2025

Keywords:

Komunikasi Publik, Era Digital, Digitalisasi Media, Keamanan Informasi, Kecerdasan Buatan, Hoaks, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRAK

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi publik, terutama melalui transformasi media dan teknologi informasi. Artikel ini membahas dampak digitalisasi terhadap komunikasi publik, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tantangan yang muncul, seperti hoaks dan disinformasi. Perkembangan media sosial dan platform digital telah menggeser pola komunikasi dari satu arah menjadi dua arah yang lebih interaktif, memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses kebijakan dan pemerintahan. Digitalisasi media komunikasi publik mendorong pemerintah dan institusi untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait keamanan informasi dan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Keamanan data, perlindungan privasi, serta penyebaran berita palsu menjadi perhatian utama dalam menjaga kredibilitas komunikasi publik. Selain itu, kemajuan kecerdasan buatan (AI) semakin memengaruhi komunikasi publik, baik dalam otomatisasi informasi, personalisasi konten,



maupun deteksi berita palsu. AI menawarkan efisiensi dalam penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika yang perlu diantisipasi. Dengan meningkatnya integrasi AI dalam komunikasi publik, diperlukan kebijakan yang jelas untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Citra Ningsih Mardalena Lase

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri

Tarutung

E-mail: lasecitra2508@gmail.com

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi media dan dinamika komunikasi telah menjadi sorotan utama dalam disiplin .Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Judul " Transformasi Sosial Di Era Digital Dalam Perubahan Media Komunikasi Publik" mencerminkan pentingnya memahami bagaimana pergeseran ini mempengaruhi lanskap komunikasi saat (Ilham Lucky Alamsyah,Nur Aulya, Siti Handayani Satriya.2023).

Perubahan sosial telah menjadi fokus utama dalam kajian sosiologi seiring dengan perkembangan zaman. Era digital, dengan segala inovasi teknologi yang membentuknya, telah menghadirkan perubahan sosial yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial, identitas, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial di era digital menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dampaknya dan merumuskan strategi adaptasi yang tepat.

Komunikasi digital ditandai dengan konektivitas yang instan dan global. Sebelum era digital, media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi. Namun, dengan munculnya internet, pola komunikasi bergeser dari model satu arah menjadi model dua arah yang lebih interaktif. New media memungkinkan setiap individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi opini, menyuarakan aspirasi, dan menjangkau audiens secara luas. Sementara itu, aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram mempermudah komunikasi interpersonal dan kelompok tanpa batas geografis.

Dalam konteks ini, komunikasi publik menjadi sangat penting karena berperan sebagai penggerak dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat terbangun dengan baik. Pentingnya komunikasi publik dalam NPM akan dapat membangun transparansi akuntabilitas dan yang lebih penting adanya terjadinya partisipasi bermakna dari masyarakat (*meaningfull participations*). Pengembangan komunikasi publik yang efektif memungkinkan pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan,



program membantu masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mengapa kebijakan diambil, disamping akan terjadi komunikasi dua arah dalam terus memperbaiki tataran implementasinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami transformasi sosial dalam perubahan media komunikasi publik di era digital. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber-sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori komunikasi publik, digitalisasi media, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era kecerdasan buatan.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dinamika perubahan komunikasi publik dan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Pentingnya Komunikasi Publik Dalam era digital

Komunikasi publik memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Di era digital, peran ini semakin vital karena teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan interaktif. Media sosial, situs web resmi, dan aplikasi layanan publik memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan publik. Selain itu, pemahaman tentang ilmu komunikasi membantu individu dan organisasi menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif di platform digital. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan kesenjangan akses teknologi harus diatasi untuk memastikan komunikasi publik yang efektif dan inklusif. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang adaptif dan responsif diperlukan untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam era digital.

Komunikasi publik yang baik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, kebijakan yang berkualitas adalah hasil dari dialog yang konstruktif antara pemerintah dan rakyat.

Konsultasi publik, forum daring dan survei digital merupakan contoh komunikasi publik dua arah, yang akan bermanfaat tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Melalui komunikasi publik yang baik maka akan dapat membantu terciptanya ruang publik yang optimis dan jernih dalam mendukung kerja kerja pemerintah, mengalirnya



informasi tentang proses perumusan kebijakan secara transparan kepada masyarakat akan dapat membantu masyarakat memahami latar belakang, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil dalam merumuskan kebijakan.

Disamping itu dengan menyampaikan informasi secara terbuka, akan terbangun akuntabilitas publik, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan yang sedang dirumuskan, serta memberikan masukan yang konstruktif tentang kebijakan yang sedang dirumuskan yang akan menciptakan proses yang lebih inklusif dan partisipatif.

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Komunikasi publik yang efektif memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memantau kebijakan serta program yang dijalankan.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat
Dengan akses informasi yang lebih luas melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik.
3. Mempercepat Penyebaran Informasi
Teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga pesan dapat segera diterima oleh khalayak yang lebih besar.
4. Membangun Hubungan yang Efektif
Pemahaman ilmu komunikasi membantu individu dan organisasi menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif di platform digital.
5. Menjaga Kredibilitas Informasi
Di tengah maraknya hoaks, media publik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat

B. Digitalisasi Media Komunikasi Publik

Digitalisasi media komunikasi publik telah mengubah secara signifikan cara pemerintah dan institusi berinteraksi dengan masyarakat. Peralihan dari media tradisional seperti radio, televisi, dan surat kabar ke platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan interaktif. Hal ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam komunikasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan modern.

Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi adalah terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan keluhan secara langsung kepada instansi terkait. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi publik dengan lebih efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Di era digital, informasi dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa verifikasi yang memadai, sehingga media publik memiliki peran penting



dalam menjaga kredibilitas informasi. Mereka harus memastikan bahwa konten yang disampaikan akurat, terpercaya, dan memenuhi tuntutan konten yang inklusif.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi komunikasi publik di era digital perlu menekankan penyebaran informasi yang terpercaya dan responsif. Pemerintah dan institusi harus mampu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk meningkatkan intensitas komunikasi dua arah, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti akademisi dan media massa. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan informasi yang akuntabel serta kredibel bagi kemajuan bangsa dan negara.

C. Keamanan dan Etika dalam Komunikasi Publik

Keamanan dan etika dalam komunikasi digital merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam era digital saat ini. Pemahaman dan penerapan etika berkomunikasi sangat penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan setiap penggunaannya.

Selain itu, pentingnya etika siber juga ditekankan dalam konteks privasi, keamanan, dan kejahatan siber. Pendekatan aksiologi teknologi terhadap privasi, keamanan, dan kejahatan siber menyoroti dilema etika dan moral yang muncul dalam era digital.

Dalam konteks media sosial, etika komunikasi berperan penting dalam melindungi privasi dan keamanan data, serta mencegah penyalahgunaan informasi. Hal ini penting untuk menjaga agar komunikasi yang dilakukan melalui media digital tetap bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, keamanan dan etika dalam komunikasi digital saling berkaitan dan menjadi landasan penting dalam menjaga integritas, privasi, dan kenyamanan pengguna di dunia maya.

Keamanan dan etika dalam komunikasi digital menjadi aspek yang sangat penting di era digital. Menurut Rahmawati & Suyoto (2021) dalam jurnal *Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber*, keamanan dalam komunikasi digital mencakup perlindungan data, enkripsi informasi, serta kesadaran pengguna dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi guna menghindari kejahatan siber. Selain itu, Nasution (2020) dalam jurnal *Paradigma Komunikasi Digital* menekankan bahwa etika dalam komunikasi digital meliputi tanggung jawab individu dalam menyebarkan informasi yang benar, menghindari hoaks, serta menghormati hak privasi orang lain agar tercipta komunikasi yang sehat di ruang digital.

Sementara itu, Sari & Nugroho (2022) dalam jurnal *Cyber Ethics and Digital Security* menyatakan bahwa keamanan digital berkaitan erat dengan penerapan regulasi dan kebijakan dalam dunia maya, seperti undang-undang ITE, perlindungan data pribadi, serta etika penggunaan media sosial yang tidak merugikan pihak lain. Dari berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa keamanan dan etika dalam komunikasi digital berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi privasi individu, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.



D. Fenomena Hoaks dan Disinformasi dalam Media Digital

Hoaks dan disinformasi menjadi tantangan besar dalam komunikasi publik di era digital. Kemudahan akses dan penyebaran informasi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform digital lainnya membuat berita palsu dapat dengan cepat tersebar luas dan memengaruhi opini publik.

Menurut Wardle & Derakhshan (2017) dalam laporan Information Disorder, hoaks dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: misinformasi, yaitu informasi salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan; disinformasi, yaitu informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu; serta malinformasi, yaitu informasi yang benar tetapi digunakan untuk merugikan seseorang atau kelompok.

Fenomena ini diperparah dengan algoritma media sosial yang sering kali memperkuat informasi yang menarik perhatian pengguna tanpa memperhitungkan kebenarannya. Menurut McIntyre (2018) dalam buku Post-Truth, masyarakat cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka (bias kognitif), sehingga berita palsu dapat lebih mudah diterima tanpa diverifikasi kebenarannya.

Dampak hoaks dan disinformasi sangat luas, mulai dari mempengaruhi keputusan politik, menimbulkan kepanikan sosial, merusak reputasi individu atau institusi, hingga mengancam keamanan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan literasi digital yang kuat agar masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Pemerintah dan platform digital juga memiliki peran dalam menerapkan regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kebijakan moderasi konten untuk membatasi penyebaran berita palsu.

Dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya hoaks dan disinformasi, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menerima informasi serta berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.

E. Masa Depan Media Komunikasi Publik dalam Era Kecerdasan Buatan

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah lanskap komunikasi publik secara signifikan. AI tidak hanya mempercepat distribusi informasi tetapi juga berperan dalam personalisasi konten, otomatisasi komunikasi, serta pengelolaan opini publik di berbagai platform digital.

Menurut Kaplan & Haenlein (2019) dalam jurnal Business Horizons, AI telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi, terutama melalui teknologi seperti chatbot, algoritma pencarian, analisis big data, dan deepfake. Dalam komunikasi publik, AI digunakan untuk mendukung jurnalisme berbasis data, mendeteksi berita palsu, serta membantu lembaga pemerintah dan perusahaan dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif.

Salah satu dampak terbesar AI dalam media komunikasi publik adalah automated content creation. AI seperti GPT (Generative Pre-trained Transformer) dan teknologi Natural Language Processing (NLP) memungkinkan pembuatan berita, laporan, dan analisis yang dapat



diproduksi dalam hitungan detik. Namun, tantangan muncul terkait validitas informasi yang dihasilkan oleh AI serta potensi penyalahgunaan dalam menyebarkan disinformasi.

AI juga berperan dalam personalisasi media, di mana algoritma dapat menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Meski dapat meningkatkan keterlibatan audiens, fenomena ini berisiko menciptakan filter bubble dan echo chamber, yang membuat pengguna hanya terpapar pada sudut pandang tertentu tanpa mendapatkan informasi yang beragam.

Di sisi lain, AI digunakan untuk meningkatkan keamanan komunikasi publik, seperti dalam deteksi ujaran kebencian, penyaringan komentar negatif, serta mitigasi penyebaran hoaks. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah mengembangkan sistem berbasis AI untuk menandai dan menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka.

Namun, masa depan media komunikasi publik dengan AI juga menghadapi tantangan etika. Menurut Floridi & Cows (2019) dalam jurnal *Nature Machine Intelligence*, regulasi dan tata kelola AI sangat penting untuk mencegah bias algoritma, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan dalam propaganda digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dalam komunikasi publik.

Ke depan, AI diprediksi akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek komunikasi publik, mulai dari jurnalisme otomatis, pelayanan publik berbasis chatbot, hingga kampanye digital yang lebih interaktif. Untuk menghadapi era ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang AI, sementara pemerintah dan perusahaan teknologi harus bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang adil dan transparan guna memastikan media komunikasi publik tetap kredibel dan aman.

Kesimpulan

Transformasi sosial di era digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara fundamental. Digitalisasi media memungkinkan komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, keamanan data, dan etika dalam komunikasi digital. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) semakin mempercepat distribusi informasi, tetapi juga memunculkan tantangan etis yang memerlukan regulasi ketat. Oleh karena itu, literasi digital, kebijakan komunikasi yang adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik yang sehat, terpercaya, dan inklusif di era digital.

Daftar Pustaka

- Floridi, L., & Cows, J. (2019). "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society". *Nature Machine Intelligence*, 1(1), 1-7.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2019). "Siri, Alexa, and Other Digital Assistants: The Future of Human-AI Interaction". *Business Horizons*, 62(1), 15-25.



McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. The MIT Press.

Nasution, R. (2020). "Paradigma Komunikasi Digital dalam Era Disrupsi". *Jurnal Paradigma Komunikasi Digital*, 8(2), 45-60.

Rahmawati, D., & Suyoto, S. (2021). "Keamanan dalam Komunikasi Digital". *Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber*, 5(1), 78-92.

Sari, R., & Nugroho, B. (2022). "Cyber Ethics and Digital Security". *Jurnal Keamanan Siber*, 10(2), 34-50.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe Report.